



Petunjuk Penyusunan LAKIP

Kementerian PAN & RB

Dasar hukum

- a. **Inpres 7/1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
- b. **PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**
- c. **Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;**
- d. **Per Menpan No 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;**
- e. **9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;**
- f. **Per MenPANRB 29/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi

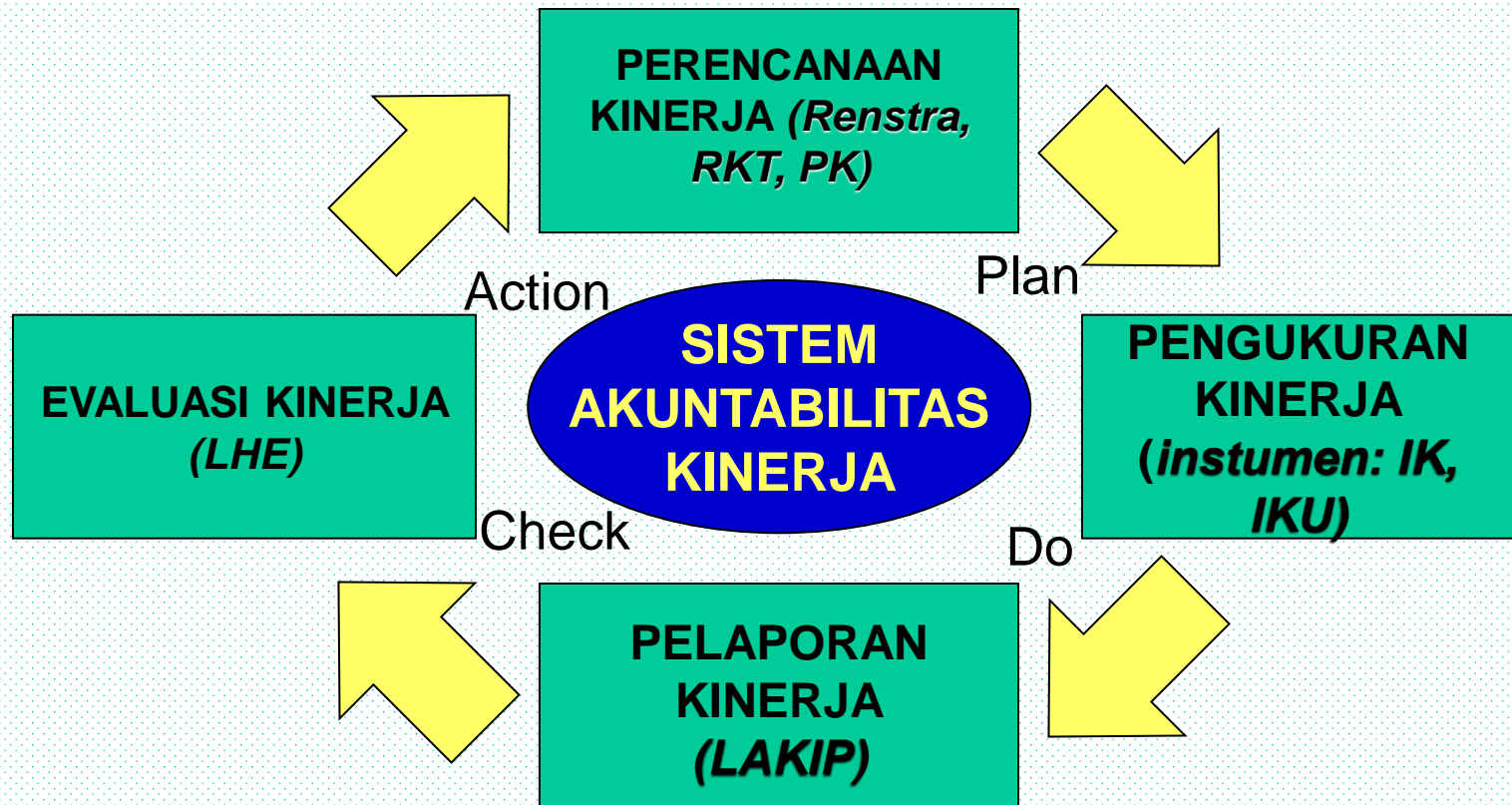
Tujuan/Sasaran merupakan kondisi atau keadaan yang ingin dicapai

Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui **alat pertanggungjawaban secara periodik**

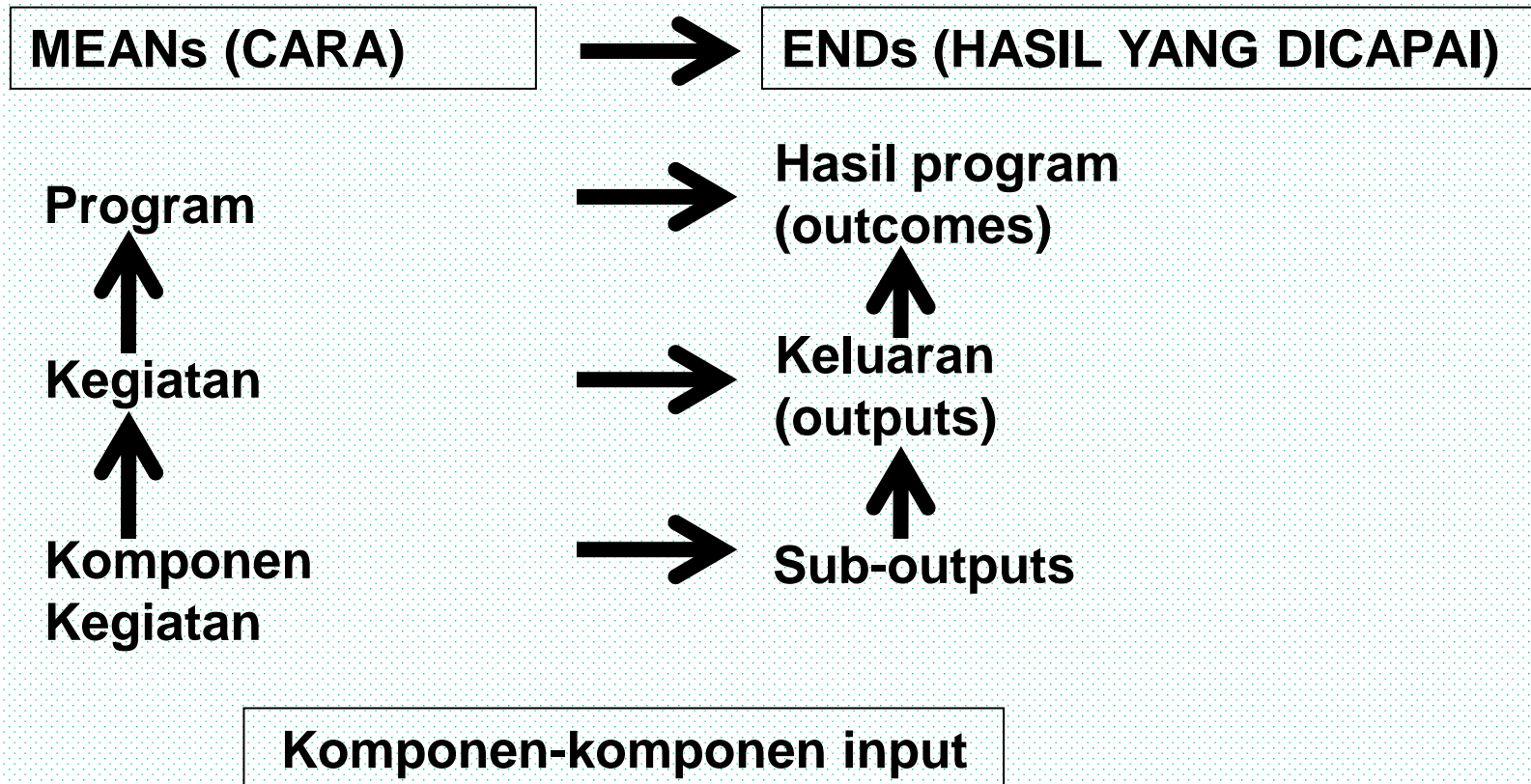
(Inpres No. 7/1999)

SISTEM AKIP



RESULT ORIENTED GOVERNMENT

Locigal Framework, perlu kejelasan:
Tujuan/sasaran atau hasil yang diinginkan,
dengan cara mencapainya.



KINERJA

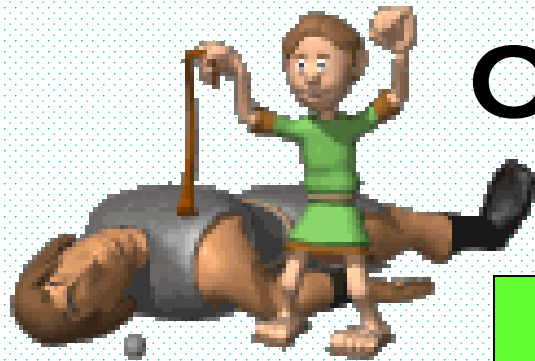
KERJA

| | |
|---|---|
| Apa yang akan dihasilkan (Outcome) Kondisi atau keadaan yang ingin diubah/diperbaiki | Apa yang akan digunakan (input) |
| | Apa yang akan dikerjakan (aktivitas) |
| | Apa yang akan dibuat (output) |
| Rencana kinerja , berarti: | Rencana Kerja , berarti: |
| Membuat rencana mengenai hasil (outcome) yang akan dicapai atau diwujudkan | Membuat rencana yang berfokus pada penggunaan input , pemilihan kegiatan, dan output yang akan dibuat |

Contoh: “Memasang rambu lalin agar kecelakaan turun 50%/th dari 120 kejadian menjadi 60 di tahun 2013”

KONDISI YANG INGIN DIPERBAIKI PADA PUSLITBANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

- ❖ *MENINGKATNYA KUALITAS HASIL PENELITIAN*
- ❖ *MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN*
- ❖ *MENINGKATNYA PUBLIKASI HASIL PENELITIAN*
- ❖ *MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN*
- ❖ *MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN
LITBANG DI PUSLITBANG BPN*



ORIENTASI KINERJA

TERJADINYA PERBAIKAN

OUT-COME

PRODUK
BER-
FUNGSI

BERFUNGSIONYA PRODUK/JASA

PRODUK
MEMPER
BAIKI

OUT-COME

ASAL
ADA
PRODUK

TERBUATNYA PRODUK/JASA

PRODUK
BER-
FUNGSI

OUT-
PUT

ASAL
TERLAK
SANA

TERLAKSANANYA KEGIATAN

ADA
PRODUK

PROSES

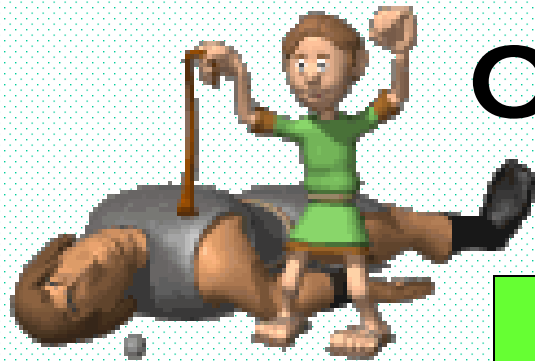
ASAL
TER-
SERAP

TERSERAPNYA ANGGARAN

TERLAK
SANA

INPUT

BERHASIL?



ORIENTASI KINERJA



INSTANSI YANG WAJIB MENYUSUN LAKIP

- **Kementerian/Lembaga**
- **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**
- **Unit Organisasi Eselon I/II**
- **Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)**
- **Unit Kerja Mandiri**

PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

- **MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA MENYAMPAIKAN LAKIP KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI PAN&RB SELAMBAT-LAMBATNYA 2,5 (DUA SETENGAH) BULAN **SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR** (15 Maret di tahun T+1 juga pada [www](http://www.bpn.go.id))**
- **GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN LAKIP KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI PAN&RB SELAMBAT-LAMBATNYA 3 (TIGA) BULAN **SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR** (15 Maret di tahun T+1 juga pada situs web resmi)**
- **LAKIP dalam bentuk utuh di-unggah (up-load) pada situs resmi K/L bersangkutan (www.bpn.go.id)**



Permasalahan dalam Penyusunan LAKIP

- ❖ Menyajikan informasi mengenai kegiatan yang tertera dalam DIPA , mestinya pencapaian tujuan/sasaran strategis
- ❖ Sasaran dan indikator kinerja (IK) LAKIP tidak selaras dengan Renstra dan Penetapan Kinerja (PK/TapKin)
- ❖ Penetapan sasaran strategis (sastra) berorientasi proses/kegiatan, bukan hasil
- ❖ Penetapan IK (IKK & IKU) tidak SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timeframe = spesifik/khas, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, terbatas waktu)



Permasalahan dalam Penyusunan LAKIP ... lanjutan

- ❖ ***Tidak membuat evaluasi dan analisis pencapaian kinerja setiap sasaran strategis dan indikator kinerja secara memadai***
- ❖ ***Tidak membuat perbandingan capaian kinerja yang memadai, yaitu dengan target tahun berjalan, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan target pada tahun terakhir Renstra***
- ❖ ***Tidak memuat akuntabilitas keuangan secara jelas yang dapat membandingkan tingkat capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran***

Keterkaitan antar-unsur dalam Penyusunan LAKIP

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-------------------|-------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

RENSTRA

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-------------------|-------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

**RENCANA
KINERJA
TAHUNAN**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-------------------|-------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

**PENETAPAN
KINERJA**

**PENGUKURAN
KINERJA**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | ? | ? |

PERUMUSAN SASARAN STRATEGIS

Perbaiki kondisi/keadaan berupa perubahan kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, proses layanan, perilaku atau pendapatan dll

PERBAIKAN KONDISI

PROSES/KEGIATAN (X)

Meningkatkan produksi padi (kuantitas)
Menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan (kuantitas)
Meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam (kualitas)
Meningkatkan efisiensi pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (efisiensi)
Meningkatkan efektivitas pameran dagang di luar negeri (efektivitas)
Meningkatnya kecepatan penerbitan dokumen kependudukan (proses layanan)
Meningkatnya peran-serta masyarakat dalam Pilkada (perilaku)
Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan (pendapatan)

Meningkatkan sosialisasi
Meningkatkan koordinasi
Meningkatkan audit terhadap
Meningkatkan fasilitasi terhadap
Meningkatkan diklat
Meningkatkan bimbingan/penyuluhan thd
dst

Khas?

Keterukuran INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dapat diukur apabila memiliki **satuan yang akan diukur/dihitung**

- ☐ Meningkatnya pemahaman peserta diklat
- ☐ Meningkatnya iman dan taqwa masyarakat

Tidak dapat diukur

- ✓ Persentase **perempuan** yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilukada
- ✓ Jumlah **bidan desa** yang terlatih menangani ibu melahirkan

Dapat diukur

“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat?”

Ketercapaian?

- ✓ Persentase **perempuan** yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilukada
- ✓ Jumlah **bidan desa** yang terlatih menangani ibu melahirkan
- ✓ Meningkatnya pemahaman pemilih pemula
- ✓ Persentase bidang tanah yang terdaftar
- ✓ Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

RELEVAN

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang dapat mengukur perubahan/perbaikan sasaran strategis

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|--|---|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan | <i>Jumlah program studi dengan akreditasi “A”</i> |
| (RELEVAN) | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan | <i>Jumlah dosen yang bergelar S2</i> |
| (KURANG RELEVAN) | |

INDIKATOR KINERJA BERORIENTASI HASIL

| Orientasi | Contoh |
|------------------------------|---|
| Hasil (Outcome) | Persentase ibu melahirkan yang dibantu tenaga kesehatan terlatih |
| Keluaran (Output) | <input type="checkbox"/> Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan pertolongan ibu melahirkan <input type="checkbox"/> Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi |
| Kegiatan (Process) (X) | Jumlah/frekuensi kegiatan yang dilaksanakan (jumlah sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, bimtek, penyuluhan, koordinasi, kerjasama dll yang dilaksanakan) |
| Masukan (Input) (X) | Jumlah anggaran, pegawai/personel/SDM, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan |

TIPE INDIKATOR KINERJA

- **Kualitatif:** menggunakan skala (misal: Tingkat kepuasan pelanggan, opini BPK, Nilai AKIP, etc)
- **Kuantitatif absolut:** menggunakan angka absolut (misal: jumlah sapi, angka harapan hidup, panjang jalan, luas kebun, jumlah sertifikat tanah, etc)
- **Persentase:** menggunakan angka persentase (misal: persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan)
- **Rasio:** membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid, persentase bidang tanah)
- **Rata-rata:** angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata nilai hasil ujian nasional SD/SMP/SMA/SMK)
- **Indeks:** angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: Indeks Persepsi Korupsi [IPK], indeks harga saham, indeks pembangunan manusia, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), etc)

Hasil (Outcomes)



*Not how many worms or how often
the bird feeds its young,
but how well the fledgling flies
(United Way of America, 1999)*

*"Bukan berapa banyak anggaran yang
digunakan atau berapa sering kegiatan
dilakukan, tetapi apa hasil yang dapat
dicapai atau diwujudkan"*

**Bukan cuma jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan,
namun seberapa nyaman dan sejahtera warga
masyarakat dari manfaat diterbitkannya.**

TINGKATAN INDIKATOR KINERJA

Tingkatan indikator kinerja (IKK & IKU) disesuaikan dengan tingkatan unit kerja

| UNIT ORGANISASI/ UNIT KERJA | TINGKATAN INDIKATOR KINERJA |
|--------------------------------|---|
| Eselon I | Indikator kinerja <i>Outcome</i> |
| Eselon II/Satker | Indikator Kinerja <i>Outcome</i> atau sekurang-kurangnya <i>output</i> (tidak perlu menetapkan indikator input dan indikator proses/kegiatan) |

Isi utama (*outline*) LAKIP ref: 29/2010

- Ringkasan Eksekutif

- Bab I. Pendahuluan

Dalam bab Pendahuluan diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

- Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab Perencanaan dan Perjanjian Kinerja dirinci beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja

- Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab Akuntabilitas Kinerja diikhtisarkan pencapaian sasaran organisasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

- Bab IV. Penutup

- Lampiran-lampiran

FORMAT LAKIP

IKHTISAR EKSEKUTIF

- ✓ Pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/PK/Tapkin dan dikaitkan dengan anggaran yang digunakan
- ✓ Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dalam PK/Tapkin;
- ✓ Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya
- ✓ Saran/rekomendasi perbaikan

FORMAT LAKIP

Bab I. Pendahuluan

- Latar Belakang Penyusunan LAKIP
(Inpres 7 Tahun 1999 dan PerMenPAN&RB
Nomor 25 Tahun 2010)
- Tugas dan fungsi organisasi
- Struktur organisasi

FORMAT LAKIP

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- Rencana Strategis K/L (BPN), Es. 1 (Settama)
- Renstra Es. 2 (Puslitbang) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran serta target
- Program/kegiatan tahun berjalan
- Perjanjian Kinerja (PK/Tapkin)

Form RENCANA STRATEGIS

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|-------------------|-------------------|--------|------|
| | | 2010 | 2014 |
| 1. | 1. | | |
| 2. | 2. | | |
| 3. etc | 3. etc | | |

Formulir Penetapan Kinerja

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| SASARAN STRATEGIS SESUAI DENGAN RENSTRA/SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN RENSTRA ATAU BERDASARKAN PENETAPAN I.K.U | ? |

Format LAKIP

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

- Memuat hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK/Tapkin)
- Memuat evaluasi dan analisis capaian kinerja, menguraikan:
 - Sajian data realisasi capaiannya
 - Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya memenuhi target
 - Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya
 - Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya
- Akuntabilitas Keuangan, memuat alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian sasaran unit kerja/organisasi

BENTUK PENYAJIAN BAB III

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Menyajikan capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK/Tapkin)

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

BENTUK PENYAJIAN BAB III

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Alinea pembuka

Sasaran 1: Meningkatnya peran-serta pemilih dalam pemilu

Sasaran ini dicapai melalui Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik pada Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih pada sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1. Subkegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
2. Subkegiatan Publikasi Informasi Pemilu
3. Subkegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu Tahun 2014

BENTUK PENYAJIAN BAB III

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---------------|------------------|----------------|
| Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada | 75% | 90% | 120% |
| Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada | 75% | xx | ?? |

BENTUK PENYAJIAN BAB III

- Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan **pada setiap indikator kinerja** masing-masing sasaran strategis
- Contoh:

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kada melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 90% dari target sebesar 75% sehingga dicapai 120%; sedangkan indikator kinerja persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kada melebihi/kurang dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar ...%.

BENTUK PENYAJIAN BAB III

1. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada

- Menyajikan data realisasi capaian tahun berjalan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada
- Membuat perbandingan realisasi capaian tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target pada akhir periode Renstra
- Hambatan/kendala atau faktor pendukung yang dihadapi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan
- Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya
- Saran untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

BENTUK PENYAJIAN BAB III

2. Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada

- ✓ Menyajikan data target dan realisasi capaian tahun berjalan pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada
- ✓ Membuat perbandingan realisasi capaian tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target pada akhir periode Renstra
- ✓ Hambatan/kendala atau faktor pendukung yang dihadapi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan
- ✓ Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya
- ✓ Saran untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

BENTUK PENYAJIAN BAB III

Sasaran 2: Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu

Sasaran ini dicapai melalui **Program** Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU pada **Kegiatan** Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data pada sub-sub-kegiatan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 2014

Selanjutnya diuraikan lebih lanjut seperti pada Sasaran 1

BENTUK PENYAJIAN BAB III

c. Akuntabilitas Keuangan

Menyajikan perbandingan antara tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % | Kegiatan/Subkegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|-----|--|----------|-----------|----|
| Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu | Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada | 75% | Dokumen kerjasama dengan Ormas dan Media Massa | xx | xx | xx |
| | | | Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | xx | xx | xx |
| | Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada | 75% | Publikasi Informasi Pemilu | xx | xx | xx |
| | | | Peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan Pemilu Tahun 2014 | xx | xx | xx |
| | | | Jumlah | xx | xx | xx |

FORMAT LAKIP

Bab V. Penutup

- Simpulan mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasinya
- Saran untuk perbaikan kinerja dalam tahun-tahun berikutnya, dapat berupa:
 - perbaikan Renstra, Visi, dan Misi
 - perbaikan kebijakan
 - perbaikan indikator kinerja
 - perbaikan perencanaan
 - perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan

FORMAT LAKIP

- Lampiran

- Tabel hasil pengukuran kinerja
- Data yang terkait/relevan

-&-

Sekian dan terima kasih



**Bagian Pemantauan dan Evaluasi (bpnrimonev@yahoo.co.id)
Biro Perencanaan & KLN, BPN RI
11 Desember 2013**

Contoh Indikator Kinerja Utama: MPR

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

Setjen MPR RI disarankan utk dpt lebih menggali IKU yg memang dpt dijadikan ukuran keberhasilan

| No | IKU | Baik | Kurang | Komentar |
|----|--|------|--------|---|
| 1 | % Peraturan Tata-tertib dan Kode Etik Anggota MPR | | V | Indikator kurang jelas, ambigu, dan diperlukan penjelasan atas pernyataan indikator ini |
| 2 | % meningkatnya pemahaman masyarakat thd nilai2 Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika | | V | <p>Indikator tidak jelas, tidak spesifik, kurang dpt diyakini, dan sulit diverifikasi; sehingga tidak dpt digunakan sebagai IKU.</p> <p>Jika yg dimaksudkan utk mengukur keberhasilan MPR RI dlm melakukan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, mungkin yg lebih dpt digunakan adalah cakupan (coverage) penyuluhan/sosialisasi secara langsung atau hasil survei kpd masyarakat.</p> |

Contoh Indikator Kinerja Utama: ANRI

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Ba ik | Kur ang | Komentar |
|----|--|----------|------------|---|
| 1 | % Lembaga Negara & Lembaga Pem yg mengelola arsip sesuai NSPK Bidang Kearsipan | V | | Contoh IKU yg baik |
| 2 | Jumlah arsip statis yg dilestarikan | | V | Indikator ini baru gambaran <i>output</i> ANRI dlm melestarikan arsip. Sebaiknya dibuatkan IKU tambahan yg lebih berorientasi <i>outcome</i> mengenai pemanfaatan pelestarian arsip |
| 3 | Jumlah akses publik thd arsip statis | V | | Contoh IKU yg baik |

Contoh Indikator Kinerja Utama: BPK

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

Sebagian IKU BPK dpt diturunkan menjadi IKU Satker. Sebaiknya IKU BPK lebih fokus pada kinerja *outcome*, bukan pada *internal business process* (IBP).

| No | IKU | Baik | Kurang | Komentar |
|----|---|------|--------|---|
| 1 | Rekomendasi yg ditindaklanjuti auditee | V | | IKU ini merupakan indikator penting yg menunjukkan kualitas temuan BPK |
| 2 | Penyelesaian penetapan kerugian Negara/Daerah | V | | IKU ini merupakan indikator penting yg menunjukkan kualitas temuan BPK |
| 3 | Jenis Opini Laporan Keuangan Tahunan | V | | IKU ini merupakan indikator penting yg menunjukkan kualitas pengel keuangan BPK |
| 4 | Indeks Kepuasan pemilik kepentingan atas LHP | V | | |
| 5 | Indeks penerapan Good Government Governance | V | | |
| 6 | Pengelolaan Kode Etik | | V | Indikator ini masih berorientasi input di lingkungan organisasi (IBP) *) |
| 7 | Pendapat yg disampaikan kpd Pemerintah | | V | IKU ini masih menunjukkan kualitas output , belum sepenuhnya berorientasi outcome . |
| 8 | Indeks Kepuasan Kerja Pegawai | | V | *) |
| 9 | Tingkat Penyerapan Anggaran | | V | *) |

Contoh Indikator Kinerja Utama: KPK

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Baik | Kurang | Komentar |
|----|---|------|--------|--|
| 1 | Indeks Persepsi Korupsi | V | | IKU belum cukup utk mengukur sasaran strategis karena baru menggambarkan persepsi masyarakat, belum berdasar data berkurangnya kasus korupsi secara nyata. |
| 2 | Indeks Integritas Nasional (IIN) Pusat/Daerah | V | | |
| 3 | Peningkatan pemahaman masyarakat thd bahaya korupsi | | V | IKU belum cukup utk menggambarkan terwujudnya perilaku anti-korupsi, baru menggambarkan pemahaman dan bukan tindakan riil masyarakat. |
| 4 | Peningkatan jumlah jaringan anti-korupsi | V | | IKU ini cukup baik utk menggambarkan adanya pembangunan sistem yg mengurangi gerak/kesempatan orang utk korupsi dlm suatu entitas organisasi pemerintah. |
| 5 | Rata-rata IPAK | V | | |
| 6 | % keberhasilan penuntutan di pengadilan | V | | IKU cukup baik utk menggambarkan adanya penindakan hukum yg jelas. |
| 7 | % keberhasilan perkara yg disupervisi | V | | IKU cukup baik utk menggambarkan adanya hasil supervisi, apabila dilengkapi dg kriteria yg jelas tentang suatu perkara dinyatakan berhasil yang jelas. |

Contoh Indikator Kinerja Utama: MK

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Baik | Kurang | Komentar |
|----|--|------|--------|---|
| 1 | % perkara yg diputus dibandingkan dg jumlah perkara tahun berjalan | V | | IK ini cukup spesifik dan relevan dg pelaksanaan tugas dan fungsi MK. |
| 2 | Rata2 jangka waktu penyelesaian perkara yg limitatif dan non-limitatif | V | | Indikator ini mengukur kecepatan pelayanan. Cukup baik utk IKU MK |
| 3 | Indeks Kepuasan Pelayanan para pihak | V | | Tidak ada info unsur indeks tsb. Patut menjadi IKU MK? |
| 4 | Indeks Persepsi Media thd MK | V | | Indikator ini cukup baik & dpt dijadikan IKU dlm mengukur pandangan & penilaian media thd MK. Namun, indeks ini agak kurang meyakinkan dan masih diperlukan beberapa penjelasan serta cara verifikasi & interpretasi angka IPM tsb. |

Contoh Indikator Kinerja Utama: BPKP

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Baik | Kurang | Komen |
|----|--|------|--------|---|
| 1 | % hasil pengawasan lintor yg dijadikan bahan pengambilan kpts o/ <i>stakeholders</i> | V | | Hasil |
| 2 | % hasil pengawasan kebendaharaan Umum Negara input kpts o/ Menkeu | V | | Outcome |
| 3 | % masukan yg dimanfaatkan Presiden | V | | Penting |
| 4 | % IPP/IPD yg laporan keuangannya memperoleh Opini minimal WDP | V | | Terukur |
| 5 | Tingkat Opini BPK thd LKPP | V | | Obyektif |
| 6 | % peningkatan penerimaan Negara dr hasil pengawasan | V | | |
| 7 | % hasil pengawasan atas permintaan <i>stakeholders</i> yg dijadikan bahan kpts S/H | V | | |
| 8 | % pemahaman & kepedulian atas permasalahan korupsi | | V | Tak terukur |
| 9 | % penyerahan kasus ke instansi penegak hukum | V | | Outcome |
| 10 | % telaahan thd Laporan Penugasan Investigasi yg memenuhi standar | | V | Output |
| 11 | % K/L & Pemda yg telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 | V | | Hasil penting |
| 12 | Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Kpts yg Andal bagi Pres/Pem | | V | Kualitas output & input, tak terukur obyektif |
| 13 | Terimplementasinya Sistem Informasi utk mendukung pengambilan kpts intern | | V | |
| 14 | Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden | | V | |

Contoh Indikator Kinerja Utama: KemenKeu

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Baik | Kurang | Komen |
|----|--|------|--------|-------|
| 1 | % realisasi pendapatan Negara | V | | |
| 2 | % realisasi penerimaan pajak | V | | |
| 3 | % realisasi penerimaan Bea & Cukai | V | | |
| 4 | % realisasi penerimaan PNBO Nasional | V | | |
| 5 | % ketepatan jumlah penyaluran Dana Transfer ke Daerah | | V | |
| 6 | % ketepatan penyerapan DIPA | | V | |
| 7 | Pemenuhan target pembiayaan melalui utang | | V | |
| 8 | Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan DN dr rekening dana investasi | | V | |
| 9 | Jumlah penerimaan kembali (recovery) yg berasal dr pengeluaran APBN | | V | |
| 10 | Nilai Kekayaan Negara yg diutilisasi | V | | |
| 11 | Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara tepat waktu | | V | |
| 12 | Pertumbuhan nilai transaksi saham harian di bursa efek | V | | |
| 13 | Perusahaan asuransi dan reasuransi yg memenuhi persyaratan minimum RBC | V | | |
| 14 | Perusahaan pembiayaan yg memenuhi rasio permodalan | V | | |
| 15 | Ketersediaan info d/r transparansi pengelolaan utang yg handal | V | | |
| 16 | Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah, & tepat sasaran | V | | |
| 17 | Jumlah LK K/L yg andal dg opini audit yg baik | V | | |
| 18 | Indeks Opini BPK atas LK Kemenkeu, BUN, dan BA 999 | V | | |
| 19 | IKP (Indeks Kepuasan Pelanggan) | V | | |

Contoh Indikator Kinerja Utama: K.PANRB

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Baik | Kurang | Komentar |
|----|---|------|--------|--|
| 1 | Jumlah kebijakan di bidang PAN | V | | IKU ini belum outcome, masih output ses tusi |
| 2 | Jumlah instansi pemerintah yg melaksanakan penataan organisasi yg proporsional & rasional | | V | IKU ini belum spesifik, perlu kembangkan angka ideks hasil evaluasi kelembagaan shg lebih nyata & lebih spesifik hasil penataannya |
| 3 | Jumlah CPNS yg direkrut & ditempatkan sesuai dg formasi jabatan, baik dari honorer maupun pelamar umum | V | | IKU ini lbh baik bila diganti %-tase |
| 4 | % peningkatan remunerasi PNS | | V | IKU ini kurang layak bagi K.PANRB |
| 5 | Jumlah instansi pemerintah yg dpt dijadikan <i>best practices</i> implementasi tata pemerintahan yg baik | V | | IKU ini dpt diterapkan jk ada kriteria yg jelas ttg "IP yg telah menerapkan GG" |
| 6 | % instansi pemerintah yg dinilai akuntabel | V | | IKU ini bagus, relevan dg kriteria "IP yg akuntabel dg hasil evaluasi AKIP-nya min CC" |
| 7 | Jumlah kab/kota yg menerapkan unit pelayanan yg melaksanakan pelayanan berstandar d/r peningkatan investasi | V | | IKU cukup baik; lebih bermakna jk diukur tingkat kepuasan penerima layanan, bukan hanya menerapkan standar layanan melainkan ukuran skor IKM unit pelayanan mencapai nilai "N" |
| 8 | Penurunan jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor eksternal | V | | |
| 9 | Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi | | V | Indikator ini agak <i>un-controlable</i> |

Contoh Indikator Kinerja Utama: KKP

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Ba ik | Kur ang | Komentar |
|----|--|----------|------------|--|
| 1 | Kontribusi PDB Perikanan thd PDB Nasional tanpa migas (%) | V | | IKU kualitas baik: gambaran hasil/outcome, dpt diukur secara obyektif & relevan utk menggambarkan tingkat produktivitas & daya saing berbasis pengetahuan |
| 2 | Produksi perikanan (juta ton) | V | | |
| 3 | Jumlah pengolah ikan (unit) | V | | |
| 4 | Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya ikan | V | | |
| 5 | Luas kawasan konservasi laut & perairan (juta ha) | V | | IKU kualitas baik: gambaran hasil/outcome, dpt diukur secara obyektif & relevan utk menggambarkan pengelolaan sumberdaya kelautan & perikanan secara berkelanjutan |
| 6 | Jumlah pulau2 kecil termasuk pulau kecil terluar yg dikelola (buah) | V | | |
| 7 | Wilayah perairan bebas IUU <i>fishing</i> & kegiatan yg merusak SDKP (%) | V | | |
| 8 | Nilai ekspor hasil perikanan (US\$ miliar) | V | | IKU kualitas baik: gambaran hasil/outcome, dpt diukur secara obyektif & relevan utk menggambarkan perluasan akses pasar domestik & internasional |
| 9 | Konsumsi ikan (kg/kap/th) | V | | |

Contoh Indikator Kinerja Utama: BIG

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Ba ik | Kur ang | Komen |
|----|--|----------|------------|--|
| 1 | Jumlah NSPK | V | | IKU menggambarkan <i>output</i> penting sesuai <i>core business</i> & terukur secara obyektif |
| 2 | Jumlah dokumen SNI di bidang pengelolaan data spasial nasional | V | | |
| 3 | Cakupan data spasial dasar nasional darat | V | | |
| 4 | Cakupan data spasial dasar nasional laut | V | | |
| 5 | Cakupan data spasial dasar nasional wilayah perbatasan | V | | |
| 6 | Cakupan data & info survei SDA & LH matra darat | V | | |
| 7 | Cakupan data & info survei SDA & LH matra laut | V | | |
| 8 | Jumlah tema data & info spasial atlas | V | | |
| 9 | % duplikasi penyediaan data & info spasial | V | | |
| 10 | % pengguna data & info geodesi & geodinamika | V | | |
| 11 | % penyerapan DIPA BIG | V | | IKU gambaran <i>internal business process</i> , bukan <i>core business</i> . Sebaiknya tak jadi IKU jk tak penting utk penjelasan keberhasilan organisasi |
| 12 | % pejabat yg telah memenuhi std kompetensi | V | | |
| 13 | IKP (Indeks Kepuasan Pelanggan) | V | | |
| 14 | Indeks Kualitas LK BIG | V | | |

Contoh Indikator Kinerja Utama: Kemenkes

Sumber: Laporan Hasil Review INDIKATOR KINERJA UTAMA Kementerian/Lembaga 2011

| No | IKU | Baik | Kurang | Komentar |
|----|---|------|--------|---|
| 1 | % produk adm kepegw yg dikelola melalui sistem layanan kepegw (elektronik) | | V | IKU kurang baik, tak gambarkan core business & tak berorientasi hasil/ outcome , melainkan masih kualitas output dukungan & input |
| 2 | % pengadaan menggunakan e-Proc | | V | |
| 3 | % provinsi & kab/kota yg memiliki bank data kesehatan | | V | |
| 4 | Jumlah Pos Kesehatan Desa beroperasi | | V | |
| 5 | Jumlah tenaga kesehatan yg didayagunakan & diberi insentif DTPK | | V | |
| 6 | % kab/kota yg telah mengalokasikan APBD bidang kesehatan min 10% dr APBD d/r pencapaian SPM | | V | |
| 7 | % penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan | V | | IKU baik, gambaran core business Kemenkes berorientasi hasil (outcome/output penting) |
| 8 | % RT yg melaks PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) | V | | |